

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey* karena penelitian ini diarahkan untuk menguji hipotesis. Sebagai konsekuensinya maka variabel-variabel penelitian perlu dioperasionalkan ke dalam indikator-indikator atau *proxy* variabel yang dapat diukur, sehingga menggambarkan jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menguji hipotesis penelitian. Berdasarkan karakteristik data tersebut, selanjutnya dirancang model uji statistik untuk menguji hipotesis penelitian yang dirumuskan.

Data penelitian diungkap dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis baik secara kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik maupun secara kualitatif, yaitu melalui analisis logis atas temuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif dilakukan penelitian survey dan korelasional, sedangkan dalam pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi kasus. Metode survey adalah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul. Metode ini digunakan untuk membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang ditentukan. Adapun *metode korelasional* dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi yang digunakan pada penelitian korelasi. Secara operasional metode survey dan korelasional digunakan terutama untuk mengungkap secara kuantitatif signifikansi hubungan variabel-variabel prakondisi implementasi kebijakan yaitu

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, terhadap tingkat pencapaian implementasi kebijakan atau program penyelenggaraan pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas dan kinerja lulusan. Pendekatan ini dipilih dengan alasan bahwa penelitian ini akan melibatkan sejumlah besar orang, sehingga untuk mencapai generalisasi dan kesimpulan perlu dipilih sampel yang dapat mewakili. Pendekatan ini dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi. Biaya pendekatan penelitian ini relatif murah ditinjau dari besarnya jumlah yang akan memberikan informasi.

Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam, dan menyeluruh terhadap variabel tertentu yang relatif kecil selama kurun waktu tertentu. Secara operasional metode penelitian ini mengungkap secara kualitatif hubungan antara tingkat pencapaian implementasi kebijakan dan mutu keluaran serta *outcome* yang akan diindikasikan oleh kinerja lulusan. Studi kasus yang akan digunakan adalah studi dokumentasi IPK dan waktu penyelesaian studi. Adapun kinerja lulusan akan diungkap persepsi lulusan, atasan, kolega, dan bawahan, terhadap kompetensi lulusan sesudah dan sebelum mengikuti pendidikan.

Studi kasus akan dibatasi pada lulusan yang bekerja di wilayah Jawa Barat, Jakarta, serta Makassar. Pendekatan ini dipilih karena akan diteliti aspek spesifik, sehingga perlu penelitian secara mendalam, rinci, dan menyeluruh. Di samping itu, pendekatan ini dapat menggunakan berbagai cara pengumpulan data, biaya relatif rendah, dan dapat menguji teori. Pengumpulan data dari berbagai kelompok responden tidak akan dilakukan dalam waktu yang bersamaan mengingat kondisi lapangan yang berbeda. Namun demikian, pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan observasi dijamin kerahasiannya, karena akan diawasi sepenuh oleh peneliti.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terdapat empat variabel utama yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu: pra kondisi implementasi kebijakan, yang di dalamnya mencakup empat subvariabel, yakni komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi, tingkat implementasi kebijakan, mutu lulusan dan kinerja lulusan. Secara operasional masing-masing variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut.

Prakondisi implementasi kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai kondisi awal yang perlu disiapkan untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik yang di dalamnya mencakup komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana kebijakan, struktur birokrasi penyelenggara pendidikan.

Komunikasi kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai sosialisasi dan komunikasi kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik yang secara intensif telah dilakukan oleh pimpinan Pusdiktek kepada pejabat di bawahnya baik dalam kerangka formal maupun informal. Dalam kerangka formal, kebijakan penyelenggaraan pendidikan disampaikan terutama pada rapat rutin internal, diseminasi dan sosialisasi tugas pokok dan fungsi, dan melalui rapat kerja yang setiap tahun dilaksanakan. Selain itu, secara rutin tahunan dilaksanakan rapat koordinasi antara Pusdiktek dan PTN dan PTS mitra kerja untuk memberikan informasi tentang kebijakan dan substansi pendidikan profesional keahlian teknik, rencana kerja pelaksanaan sosialisasi dan seleksi, dan proses administrasi kontraktual.

Sumber daya dalam penelitian ini diartikan sebagai penyediaan berbagai hal untuk mendukung terselenggaranya pendidikan profesional keahlian teknik. *Pertama*, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di tiga tempat, yaitu Bandung: Balai Kerjasama Pendidikan Magister Pengembangan Sumber Daya Air

(PSDA), dan Balai Kerjasama Pendidikan Diploma dan Magister Jalan dan Jembatan; Semarang: Balai Kerjasama Pendidikan Diploma dan Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota; Surabaya: Balai Kerjasama Pendidikan Diploma dan Magister Prasarana Lingkungan Permukiman. *Kedua*, penyediaan peralatan pendidikan, peralatan kantor, dan sejenisnya, agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik. *Ketiga*, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia meliputi penyediaan personel untuk pengelola, pelatihan administrasi pendidikan bagi para pengelola pendidikan, pelatihan bimbingan dan konseling bagi para calon wali kelas, pelatihan teknologi pembelajaran bagi pengajar dan calon tenaga pengajar, serta penyediaan karyasiswa yang telah dipilih dengan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat*, penyediaan materi pendidikan yang dikemas ke dalam kurikulum, meliputi dua bagian pokok, yaitu akademik dan aplikatif. *Kelima*, materi perkuliahan yang bersifat akademik, yang memberikan dasar-dasar teori untuk memberikan landasan, dan mendukung serta memberikan pertanggungjawaban terhadap keabsahan materi perkuliahan yang bersifat aplikatif. *Keenam*, materi perkuliahan yang bersifat aplikatif, yang memberikan kemampuan dan keterampilan untuk pelaksanaan tugas. Materi perkuliahan ini pada dasarnya disusun untuk menjabarkan dan mengemas konsep, sistem, pendekatan, termasuk juga NSPM yang dikeluarkan oleh Dep. Kimpraswil. *Ketujuh*, penyediaan dana dari anggaran pembangunan dan rutin sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Dep. Kimpraswil.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai pengetahuan, afeksi, dan kecenderungan bertindak para pelaksana kebijakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

Struktur birokrasi dalam penelitian ini merujuk pada struktur organisasi dan penyediaan SOP. Struktur organisasi adalah pembagian tugas dan fungsi dari pusat

yang meliputi bagian, bidang, dan balai yang berlokasi di Bandung dua balai, di Semarang: satu balai, di Surabaya: satu balai, di Palembang satu balai, di Banjarmasin satu balai, dan di Jayapura satu balai. SOP merujuk pada pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dari fungsi dan tugas masing-masing bagian, bidang, dan balai yang setiap tahun ditetapkan untuk menjadi acuan kerja masing-masing bagian, bidang, dan balai dalam melaksanakan kerja secara operasional.

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan yang mencakup: pelaksanaan manajemen kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan PTN dan PTS terkemuka dengan pola kemitraan dan *tailor-made*; pembiayaan penyelenggaraan pendidikan berupa bantuan penuh, fasilitasi, dan swadana; kurikulum berbasis kompetensi yang terdiri atas pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi; pengembangan dan pembinaan teknologi pembelajaran orang dewasa, sistem seleksi yang merujuk pada pengembangan materi tes, penyebaran lokasi pelaksanaan tes, dan penetapan kelulusan, pemanggilan dan penempatan, dan pengembangan dan pembinaan bimbingan dan konseling, yang mencakup bimbingan perwalian, SSS, CPD, kelembagaan, dan pembinaan serta pengembangan *counselor*.

Mutu lulusan atau keluaran merujuk pada ketepatan menyelesaikan studi tepat pada waktunya dan IPK yang diraih dari masing lulusan setiap jenjang program studi. Kinerja lulusan merujuk peningkatan kompetensi keteknikan, kompetensi manajerial, komitmen kerja, dan ketepatan penempatan lulusan D3, D4, dan Magister.

C. Populasi dan Penentuan Ukuran Sampel

Populasi sasaran untuk pendekatan survai dalam penelitian ini adalah: seluruh pimpinan dan staf pada Pusdiktek, mulai dari pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV, dan staf profesional sebanyak 37 orang; pejabat dan staf balai di lingkungan

Pusdiktek sebanyak 70 orang; tenaga pengajar praktisi yang terlibat dalam proses pembelajaran 84 orang; dan Dekan, Pembantu Dekan, Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program studi PTN dan PTS mitra, sekitar 203 orang. Secara rinci gambaran populasi penelitian ini disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1.
Populasi Penelitian

No.	Pelaksana kebijakan	Jumlah (orang)
1.	Pejabat dan Staf Pusdiktek	37
2.	Pejabat dan Staf Balai	70
3.	Pejabat dan Staf PTN Mitra	203
4.	Tenaga Pengajar Praktisi	84
Total		394

Sumber: Pusdiktek dan PTN mitra di olah

Adapun populasi penelitian studi kasus untuk mengungkap kinerja lulusan adalah lulusan program D3, D4, dan magister yang bekerja di beberapa institusi, yaitu Dep. Kimpraswil baik yang ada di Jakarta dan Bandung, Dinas Pekerjaan Umum/Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya Propinsi Jawa Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum/Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Penentuan responden dalam penelitian ini tidak dilakukan sensus karena berbagai pertimbangan, antara lain karena tidak mungkin menjangkau semua pejabat dan staf PTN dan PTS mitra yang tersebar diseluruh Indonesia dan di samping itu diperlukan dana, waktu serta tenaga yang tidak sedikit, balai yang ada di lingkungan Pusdiktek tersebar di Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Banjarmasin, dan Jayapura. PTN dan PTS mitra juga hampir tersebar di seluruh Indonesia, seperti Lhokseumawe, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, Kendari, Kupang, dan Jayapura. Begitu juga para

lulusan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Propinsi Aceh sampai di Propinsi Papua. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sampel yang diupayakan serepresantif mungkin. Diharapkan dengan sampel tersebut dan analisis data yang tepat akan dihasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi untuk populasi yang menjadi objek penelitian.

Sampel penelitian untuk mengungkap hubungan antara variabel komunikasi kebijakan, sumber daya, sikap pelaksanaan, dan struktur birokrasi, terhadap pencapaian program penyelenggaraan pendidikan, meliputi semua jajaran manajemen di Pusdiktek, Balai Kerjasama Pendidikan Diploma dan Magister di Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Banjarmasin, dan Jayapura; Dekan, Pembantu Dekan, Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Teknik Sipil ITB, Polban, Undip, ITS, dan Unhas. Untuk menelaah mutu lulusan, data diungkap melalui dokumentasi lulusan D3, D4, dan magister di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Adapun studi kasus yang dilakukan di beberapa instansi di Propinsi Jawa Barat dan Jakarta untuk mengungkap kinerja lulusan meliputi lulusan program D3, D4, dan magister, atasan, kolega, dan bawahannya.

Ukuran sampel minimal dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan model hipotesis yang akan diuji. Hipotesis dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh sejumlah variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Oleh karena model hipotesis ini pada dasarnya merupakan model hipotesis korelasi maka ukuran sampel minimal dalam penelitian ini ditentukan secara iteratif (Machin & Campbell, 1987: 191-193) seperti halnya penentuan ukuran sampel minimal untuk uji hipotesis korelasi.

Untuk menentukan ukuran sampel minimal dengan cara seperti itu, perlu ditentukan terlebih dahulu *level of significant* (α), *power of the test* ($1-\beta$), dan koefisien korelasi terkecil antarvariabel bebas yang diperoleh melalui hasil penelitian terdahulu.

Karena belum ada data empirik tentang koefisien korelasi terkecil antarvariabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini maka harga ρ yang dipilih sebesar 0,30 (korelasi rendah), harga α sebesar 0,05, dan harga $(1-\beta)$ sebesar 0,95. Berdasarkan tabel *Sample Sizes for Detecting a Statistically Significant Correlation Coefficient* (Machin & Campbell, 1987:191-3) diperoleh ukuran sampel minimal sebanyak 138 orang. Dalam penelitian ini ukuran sampel riil dinaikkan menjadi 145 orang.

Penentuan anggota sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *proportional random sampling*. Untuk jelasnya, ukuran dan penyebaran sampel penelitian ini disajikan padan tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No.	Pelaksana kebijakan	Jumlah (orang)
1.	Pejabat dan Staf Pusdiktek	14
2.	Pejabat dan Staf Balai	26
3.	Pejabat dan Staf PTN Mitra	74
4.	Tenaga Pengajar Praktisi	31
Total		145

Sumber: Data penelitian, diolah

D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan hasil maksimal dengan langkah-langkah yang benar serta menepis kekeliruan yang sekecil-kecilnya. Di samping itu untuk menetapkan data yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Prosedur penelitian secara bertahap meliputi persiapan yaitu merumuskan latar belakang masalah, perumusan masalah sampai hipotesis penelitian. Dilanjutkan dengan tinjauan kepustakaan, menyusun kisi-kisi dan instrumen, melakukan kalibrasi instrumen secara konseptual oleh *expert*, melakukan kalibrasi

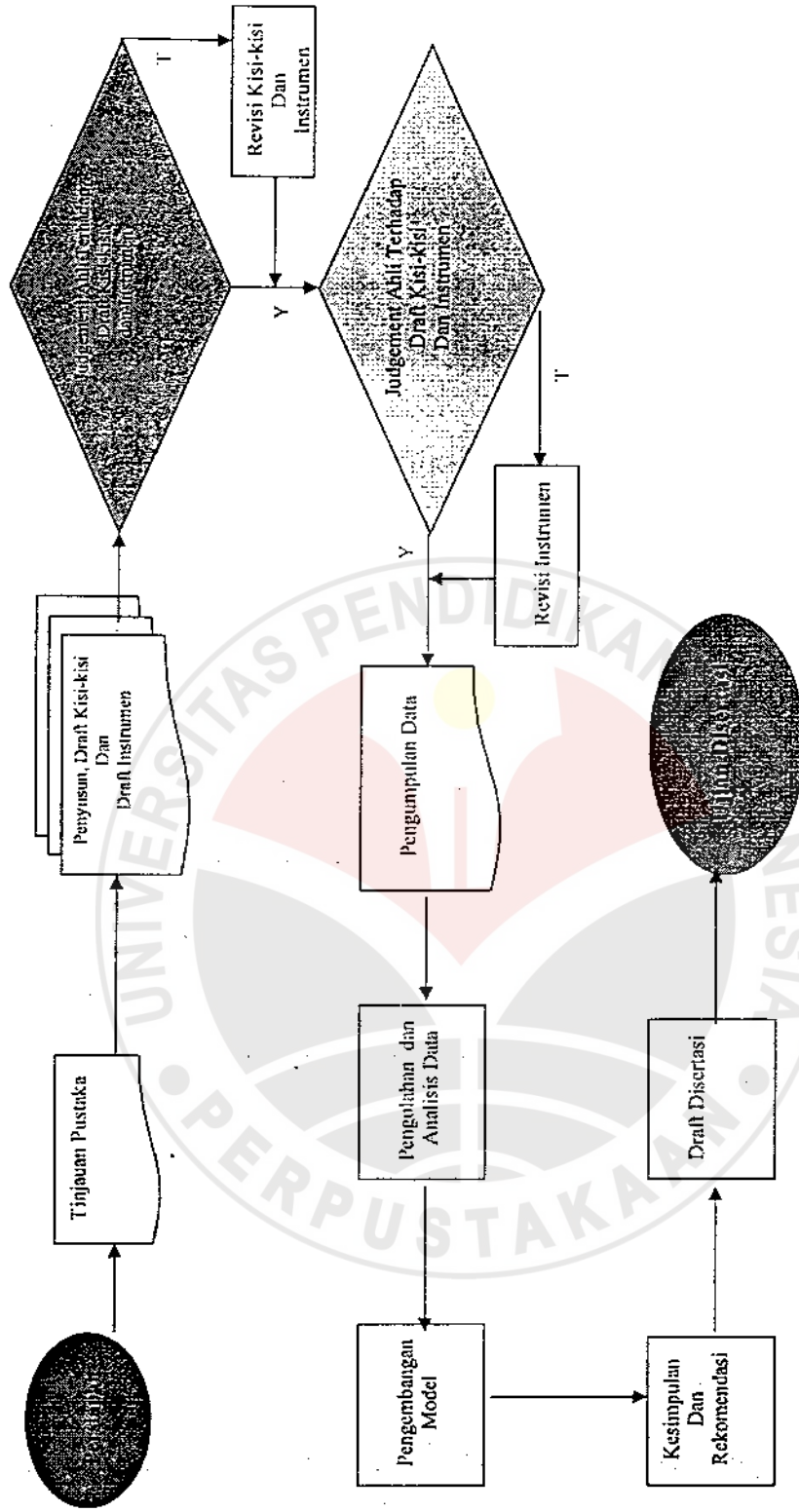
melalui uji empirik terhadap instrumen yang telah teruji secara konseptual, mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan mensintesis, dan mengambil kesimpulan dan temuan-temuan serta implikasi dan rekomendasinya. Secara grafis prosedur penelitian sebagaimana gambar 3.1.

1. Persiapan

Tahapan ini merupakan pengumpulan data pendahuluan yang dimaksudkan untuk mengetahui garis besar keadaan lapangan, menyaring masalah penelitian, dan menemukan kesulitan yang akan dihadapi pada saat penelitian. Informasi yang terkumpul berupa catatan penting yang memperlihatkan eksistensi dan kompetensi Pusdiktek dalam menunjang kebijakan pengembangan sumber daya manusia bidang permukiman dan prasarana wilayah.

2. Penyusunan Kisi-Kisi Instrumen Pengungkap Data

Kisi-kisi instrumen dikembangkan berdasarkan konsep yang relevan terhadap setiap variabel penelitian. Kisi-kisi ini meliputi kisi-kisi prakondisi implementasi kebijakan yang terdiri variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, tingkat implementasi kebijakan, serta mutu dan kinerja lulusan.



Gambar 3.1. Prosedur Penelitian

a. Prakondisi Implementasi Kebijakan

Kisi-kisi instrumen penelitian pengungkap data prakondisi implementasi kebijakan sebagaimana tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3.
Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Data Pra kondisi
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan

Variabel	Aspek	Dimensi	Indikator	Pernyataan Nomor	Skala	
Komunikasi	1. Sumber Komunikasi	a. Pimpinan, Atasan Langsung, Kolega, Mitra Kerja	a). Kejelasan dan kecukupan mengkomunikasikan kebijakan	1, 2, 3, 4	1 s.d 5	
	2. Pesan atau Muatan informasi	a. Kualitas substansi Kebijakan yang Disampaikan	a). Ketepatan informasi yang disampaikan	5	1 s.d 5	
	3. Media transmisi komunikasi	a. Frekuensi diskusi dengan pelaksana	a). Kecukupan media	6, 7	1 s.d 5	
		b. Bulletin, Website, leaflet	a). Efektivitas media	8, 9, 10, 11, 12	1 s.d 5	
4. Penerima informasi	a. Pelaksana kebijakan	a). Pemahaman Pelaksana terhadap Kebijakan yang disampaikan	13, 14, 15	1 s.d 5		
Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia	a. Pengelola	a). Kecukupan jumlah	16	1 s.d 5	
			b). Kecukupan kualitas	17, 18	1 s.d 5	
			c). Integritas	19, 20, 21, 22, 23	1 s.d 5	
		b. Tenaga Pengajar	a). Komitmen	24, 25, 26, 27,	1 s.d 5	
			b). Kompetensi	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	1 s.d 5	
		c. Peserta Didik	a). Kompetensi	37, 38	1 s.d 5	
	b). Komitmen		39, 40, 41	1 s.d 5		
	2. Sumber Belajar	a. Kurikulum	a). Ketersediaan	42, 43	1 s.d 5	
			b). Relevansi	44, 45,	1 s.d 5	
	3. Sarana, dan Prasarana	a. Fasilitas untuk KBM	a). Ketersediaan dan pemanfaatan lab.	46, 47	1 s.d 5	
			b). Ketersediaan perpustakaan dan tingkat pemanfaatan	48, 49,	1 s.d 5	
			c). Ketersediaan ruang belajar dan tingkat pemanfaatan	50, 51	1 s.d 5	
			d). Ketersediaan peralatan dan tingkat pemanfaatan	52, 53	1 s.d 5	
		4. Sistem Informasi	a. Manajemen Pendidikan	a). Ketersediaan	54, 55, 56, 57	1 s.d 5
				b). Tingkat Pemanfaatan	58, 59, 60, 61, 62	1 s.d 5
	5. Dana	a. Dana Pemerintah	a). Kecukupan dan DIP	63	1 s.d 5	
			b). Jaminan keberlanjutan	64	1 s.d 5	
c). Ketepatan penggunaan dana			65	1 s.d 5		
b. APBD		c). Kecukupan dana rutin dan ketepatan penggunaan	66, 67	1 s.d 5		
		a). Kecukupan partisipasi instansi pengutus dalam pembiayaan pendidikan	68, 69	1 s.d 5		
			70	1 s.d 5		
Disposisi pelaksana kebijakan	Integritas	a. Komitmen	a). Kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan	71, 72	1 s.d 5	
			a). Pemahaman kebijakan	73, 74	1 s.d 5	
Struktur Birokrasi	Organisasi	a. Struktur organisasi	a). Kesesuaian struktur organisasi	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81	1 s.d 5	
			a). Ketepatan penempatan lokasi organisasi	82, 83, 84, 85,	1 s.d 5	
	Standar Operasi Prosedur	c. Sistem dan Mekanisme Kerja	a). Ketersediaan standar operasi prosedur	86	1 s.d 5	
			b). Tingkat Pemanfaatan	87, 88, 89	1 s.d 5	
	b. Pembagian Kerja	a). Kesesuaian Pembagian Kerja	90	1 s.d 5		

Sumber: Hasil Penelitian diolah

b. Tingkat Implementasi Kebijakan

Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap data tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik dijabarkan dari konsep, aspek, dimensi, dan indikator yang telah diuraikan pada bab II. Secara rinci kisi-kisi tersebut sebagaimana tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4.
Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Data Tingkat Implementasi
Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan

Variabel	Aspek	Dimensi	Indikator	Pernyataan Nomor	Skala	
Pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan pendidikan	1. Penyebaran Jaringan Kerjasama dengan PTN di seluruh Indonesia	a. Kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan	Efektivitas dalam peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	1, 2, 3, 4,	1 s.d 5	
		b. Pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan	Efektivitas dalam peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan	5, 6, 7, 8	1 s.d 5	
		c. Pemanfaatan aset	Efektivitas dalam mengoptimalkan aset Dep/Dimas Kumparswil	9, 10, 11, 12, 13	1 s.d 5	
		d. Biaya	Efisiensi pembiayaan	14		
		e. Pemberdayaan stakeholder	Peningkatan peran serta	15, 16, 17, 18		
	2. kerjasama pelaksanaan pendidikan dengan pola kemitraan	a. Kualitas penyelenggaraan pendidikan	Efektivitas dalam peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	19, 20,	1 s.d 5	
		b. Pemanfaatan aset	Efektivitas dalam mengoptimalkan aset	21, 22, 23	1 s.d 5	
		c. Biaya	Efisiensi biaya pendidikan	24	1 s.d 5	
		d. Pemberdayaan stakeholder	Peningkatan peran serta stakeholder dalam proses	25, 26	1 s.d 5	
	3. Kerjasama pelaksanaan pendidikan dengan pola regional	a. Kualitas penyelenggaraan pendidikan	Efektivitas dalam peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	27, 28,	1 s.d 5	
		b. Pemanfaatan aset	Efektivitas dalam mengoptimalkan aset	29, 30	1 s.d 5	
		c. Biaya	Efisiensi biaya pendidikan	31	1 s.d 5	
		d. Pemberdayaan stakeholder	Peningkatan peran peran sert stakeholder	32		
	4. Kerjasama pelaksanaan pendidikan dengan pola provinsi	a. Kualitas penyelenggaraan pendidikan	Efektivitas dalam peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	33, 34	1 s.d 5	
		b. Peningkatan pemanfaatan aset	Efektivitas dalam mengoptimalkan aset	35, 36	1 s.d 5	
		c. Biaya	Efisiensi biaya pendidikan	37	1 s.d 5	
		d. Pemberdayaan stakeholder	Peningkatan peran serta stakeholder	38		
	5. Pelaksanaan pendidikan secara sentralisasi	a. Peningkatan kualitas pendidikan	Efektivitas dalam peningkatan kualitas dan relevansi	39, 40, 41	1 s.d 5	
	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan	1. Bantuan penuh	a. Program magister	Efektivitas penyelenggaraan pendidikan	42, 43	1 s.d 5
			b. Program D-4	Efektivitas penyelenggaraan pendidikan	44, 45, 46	1 s.d 5
c. Program D-3			Efektivitas penyelenggaraan pendidikan	47, 48, 49	1 s.d 5	
2. Bantuan Fasilitas		a. Program D-3	Efektivitas penyelenggaraan pendidikan	50, 51, 52,	1 s.d 5	
		3. PNPB	a. Program D-3, D-4 dan Magister	Ketersediaan pola PNPB dalam penyelenggaraan pendidikan	53	1 s.d 5
Kurikulum Berbasis Kompetensi		1. Pengembangan	a. Program Magister	a.1. Efektivitas pengembangan kurikulum	54,	1 s.d 5
	a.2. Relevansi pengembangan kurikulum			55, 56, 57, 58, 59	1 s.d 5	
	a.3. Pemberdayaan Stakeholder			60, 61, 62	1 s.d 5	
	b. Program D-4		b.1. Efektivitas pengembangan kurikulum	63, 64, 65	1 s.d 5	

			b.2.Relevansi pengembangan kurikulum	66, 67	1 s.d 5
			b.3.Pemberdayaan Stakeholder	68, 69, 70, 71, 72, 73	1 s.d 5
		c. Program D-3	c.1.Efektivitas pengembangan kurikulum	74, 75, 76	1 s.d 5
			c.3.Pemberdayaan Stakeholder	77, 78, 79	1 s.d 5
	2. Pelaksanaan	a. Program Magister, D-4, dan D-3	Efektivitas pelaksanaan kurikulum	80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	1 s.d 5
	3. Evaluasi	a. Program Magister, D-4, dan D-3	Efektivitas Evaluasi kurikulum	97, 98, 99, 100	1 s.d 5
Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pembelajaran	1. Pembelajaran orang-orang dewasa	a. Team Teaching	Tingkat implementasi	101, 102	1 s.d 5
		b. Cooperative Learning	Tingkat implementasi	103, 104,	1 s.d 5
		c. Pelatihan TOT	Efektifitas pelaksanaan manfaat dan kecukupan TOT	105, 106, 107, 108	1 s.d 5
Sistem Seleksi	1. Sosialisasi	a. Waktu pelaksanaan	Ketepatan waktu pelaksanaan sosialisasi	109, 110	1 s.d 5
		b. Bahan sosialisasi	Kelengkapan bahan	111, 112, 113, 114	1 s.d 5
		c. Pelaksanaan sosialisasi	Kejelasan dalam menyajikan informasi	115	1 s.d 5
	2. Pelaksanaan seleksi	a. Lokasi seleksi	Ketepatan lokasi tes	116, 117, 118	1 s.d 5
		b. waktu pelaksanaan	Ketepatan waktu pelaksanaan seleksi	119, 120	1 s.d 5
		c. Materi tes	Kualitas Mater Tes	121	1 s.d 5
	3. Pemanggilan dan penempatan	a. Proses penetapan	Kecukupan waktu penetapan kelulusan	122	1 s.d 5
		b. Pemanggilan	b.1. Kecukupan waktu antara pemanggilan dan pendaftaran	123	1 s.d 5
			b.2. Kejelasan informasi dalam pemanggilan	124	1 s.d 5
	b.3. Ketepatan media pemanggilan	125, 126	1 s.d 5		
Pengembangan Dan Pembinaan Bimbingan Dan Konseling	1. Bimbingan Perwakilan	a. Perencanaan	Ketepatan perencanaan	127, 128, 129, 130, 131, 132, 133	1 s.d 5
		b. Pelaksanaan	Ketepatan pelaksanaan	134	1 s.d 5
		c. Manfaat	Efektivitas pelaksanaan	135, 136, 137, 138	1 s.d 5
	2. Student Support Servis (SSS)	a. Perencanaan	Ketepatan perencanaan	139, 140	1 s.d 5
		b. Pelaksanaan	Ketepatan pelaksanaan	141, 142, 143	1 s.d 5
		c. Manfaat	Efektivitas pelaksanaan	144, 145, 146, 147	1 s.d 5
	3. Carrier Planning Development (CPD)	a. Perencanaan	Ketepatan perencanaan	148, 149	1 s.d 5
		b. Pelaksanaan	Ketepatan pelaksanaan	150, 151, 152, 153, 154	1 s.d 5
		c. Manfaat	Efektivitas pelaksanaan	155, 156	1 s.d 5
	4. Kelembagaan	a. Lembaga Fungsional BK	Tingkat fungsional BK	157, 158	1 s.d 5
		b. Manfaat	Efektivitas lembaga	159, 160, 161	1 s.d 5
	5. Pembinaan Dan Pengembangan Councilor	a. Perencanaan	Ketepatan perencanaan	162, 163, 164, 165	1 s.d 5
		b. Manfaat	Efektivitas pemanfaatan hasil pembinaan	166, 167, 168, 169, 170	1 s.d 5

Sumber: Hasil Penelitian diolah

c. Mutu Lulusan

Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap data mutu lulusan pendidikan profesional keahlian teknik dijabarkan dari konsep, aspek, dimensi, dan indikator yang telah diuraikan pada bab II. Secara rinci kisi-kisi tersebut tampak sebagaimana tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5.
Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Data Kualitas
Lulusan Program D3, D4, dan Magister

Variabel	Aspek	Dimensi	Indikator	
Keluaran	Jumlah lulusan	a. Program D-3	a. Pencapaian dibandingkan dengan target	
		b. Program D-4	b. Pencapaian dibandingkan dengan target	
		c. Program Magister	c. Pencapaian dibandingkan dengan target	
	Mutu	a. Tepat waktu	a.	a. Rasio karyawan D-3 yang menyelesaikan studi tepat waktu
			b.	b. Rasio karyawan D-4 yang menyelesaikan studi tepat waktu
			c.	c. rasio karyawan magister yang menyelesaikan studi
		b. Indeks Prestasi Kumulatif D-3	a.	a. Rata-rata IPK
			b.	b. IPK tertinggi D-3
			c.	c. IPK terendah D-3
		c. Indeks Prestasi Kumulatif D-4	a.	a. Rata-rata IPK
			b.	b. IPK tertinggi
			c.	c. IPK terendah
		d. Indeks Prestasi Kumulatif Magister	a.	a. Rata-rata IPK
b.	b. IPK tertinggi			
c.	c. IPK terendah			

Sumber: Hasil Penelitian diolah

d. Kinerja Lulusan

Kisi-kisi instrumen penelitian lulusan program D3, D4, dan magister ditentukan sebagaimana tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6.
Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Data Kinerja
Lulusan Program D3, D4, dan Magister

Variabel	Aspek	Dimensi	Indikator	Perny. Nomor	Skala
Kinerja lulusan	1. Program D3	a. Kompetensi keteknikan	a. Kemampuan dalam menerapkan norma Standar Pedoman manual (NSPM)	1, 2, 3	1-5
			b. Kemampuan dalam SIDCOM	4, 5, 6, 7	1-5
			c. Kemampuan dalam PPBS	8, 9, 10, 11, 12	1-5
		b. Kompetensi Manajerial	a. Kompetensi berkomunikasi	13, 14	1-5
			b. Kompetensi bekerjasama dalam tim	15	1-5
			c. Kompetensi pengendalian diri	16	1-5
			d. Kompetensi berinisiatif	17	1-5
			e. Kompetensi Semangat Berprestasi	18, 19	1-5
			f. Kompetensi Percaya Diri	20, 21	1-5
		c. Komitmen	a. Kesungguhan dalam bekerja	22	1-5
			b. kompetensi Komitmen pada Organisasi	23	1-5
			c. Disiplin dalam melaksanakan tugas	24	1-5
	d. Penempatan	a. Relevansi penempatan lulusan.	25	1-5	
	2. Program D4	a. Kompetensi Keteknikan	a. Kemampuan dalam NSPM, dan SIDCOM	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1-5
			b. Kemampuan dalam PPBS	8, 9, 10, 11, 12	
			c. Kemampuan berpikir analitik	13, 14, 15, 16, 17	1-5
		b. Kompetensi Manajerial	a. Kompetensi Berkomunikasi	18, 19, 20, 21	1-5
			b. Kompetensi Bekerjasama dalam tim	22	1-5
c. Kompetensi Mempengaruhi orang lain			23	1-5	
d. Kompetensi fleksibel	24	1-5			
e. Kompetensi pengendalian diri	25	1-5			
f. Kompetensi Berinisiatif	26	1-5			

3. Program Magister	c. Komitmen	g. Kompetensi Semangat Berpartisipasi	27, 28	1-5	
		h. Kompetensi Percaya Diri	29, 30	1-5	
	d. Penempatan	a. Kesungguhan dalam bekerja	31, 32	1-5	
		b. Disiplin dalam melaksanakan tugas	33	1-5	
	a. Kompetensi Ketechnikan	a. Relevansi penempatan lulusan	34, 35, 36, 37	1-5	
		b. Kemampuan dalam NSPM	1, 2, 3	1-5	
		b. Kemampuan dalam pengembangan SIDCOM	4, 5	1-5	
		Kemampuan dalam PPBS	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1-5	
		c. Kemampuan berpikir analitik	13, 14, 15, 16, 17		
		d. Kemampuan dalam penusunan KSP	18, 19, 20, 21, 22	1-5	
		b. Kompetensi Manajerial	a. Kompetensi Berkomunikasi	23, 24, 25, 26	1-5
			b. Kompetensi bekerjasama dalam tim	27	1-5
			c. Kompetensi mempengaruhi orang lain	28	1-5
			d. Kompetensi Fleksibel	29	1-5
	e. Kompetensi pengendalian diri		30	1-5	
	f. Kompetensi berinisiatif		31	1-5	
	g. Kompetensi Semangat Berprestasi		32, 33	1-5	
	h. Kompetensi Percaya diri		34, 35		
	i. Kompetensi mengembangkan orang lain		36, 37	1-5	
	c. Komitmen		a. Kesungguhan dalam bekerja	38, 39	1-5
		b. Disiplin dalam melaksanakan tugas	40	1-5	
	d. Penempatan	c. Relevansi penempatan lulusan	41, 42	1-5	

Sumber: Hasil Penelitian diolah

3. Penyusunan Instrumen Pengungkap Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi prakondisi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi, tingkat implementasi kebijakan, kualitas keluaran dan kinerja lulusan. Untuk mengungkap data digunakan kuesioner dan dilengkapi dengan studi dokumentasi dan wawancara. Sementara itu, teknik wawancara digunakan untuk validasi dan *cross check* data yang diperoleh melalui kuesioner.

Sehubungan dengan hal itu maka dalam penelitian ini dikembangkan sebuah pedoman studi dokumentasi untuk mengungkap kualitas keluaran dan seperangkat kuesioner yang terdiri atas tiga komponen. Masing-masing komponen kuesioner tersebut mengungkap prakondisi implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi; tingkat implementasi kebijakan; dan kinerja lulusan. Kuesioner yang dikembangkan adalah kuesioner model Likert dengan lima alternatif jawaban.

Dalam penelitian ini, kelima alternatif jawaban responden pada setiap butir pernyataan kuesioner merentang mulai dari "sangat baik" sampai "sangat tidak baik". Rentangan jawaban itu menunjukkan intensitas kesesuaian isi yang terkandung dalam setiap butir pernyataan kuesioner dengan kondisi objektif yang dialami, dirasakan, diamati, atau dipersepsi oleh responden. Masing-masing alternatif jawaban itu rumusnya disesuaikan dengan konten masing-masing butir pernyataan kuesioner. Butir pernyataan instrumen penelitian tersebut semuanya memiliki arah positif

Sesuai dengan model kuesioner yang telah diungkapkan dalam uraian sebelumnya, untuk mengungkap data prakondisi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan, dikembangkan sebuah instrumen yang terdiri atas 90 butir pernyataan dengan arah positif. Untuk mengungkap atau mengumpulkan data tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan, dikembangkan sebuah instrumen yang terdiri atas 170 butir pernyataan dengan arah positif. Untuk mengungkap data kualitas lulusan, dikembangkan sebuah instrumen yang terdiri atas 33 butir pernyataan pedoman studi dokumentasi. Untuk mengungkap data kinerja lulusan, dikembangkan sebuah instrumen yang terdiri atas 104 butir pernyataan dengan arah positif, dengan rincian 25 butir pernyataan mengungkap kinerja lulusan program D3; 37 butir pernyataan mengungkap kinerja lulusan program D4; dan 42 butir pernyataan mengungkap kinerja lulusan program Magister. Pernyataan-pernyataan tersebut, dijabarkan dari variabel, dimensi, serta indikator-indikator definisi operasional variabel-variabel pra kondisi implementasi kebijakan, tingkat implementasi kebijakan, mutu dan kinerja lulusan, secara lengkap instrumen tersebut disajikan pada Lampiran 1.

Sementara itu, untuk wawancara dikembangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sesuai dengan kebutuhan. Wawancara ini dilakukan untuk memvalidasi data yang diperoleh melalui kuesioner. Dalam proses analisis, data yang diperoleh melalui ketiga model instrumen tersebut digabungkan sehingga saling melengkapi.

4. Deskripsi Instrumen Pengungkap Data

Deskripsi instrumen penelitian atau alat pengumpul data yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut.

- a. Kuesioner dalam bentuk pernyataan tertutup yang disusun untuk mengungkap variabel prakondisi implementasi kebijakan, tingkat implementasi kebijakan, dan mutu lulusan program pendidikan keahlian teknik D3, D4, dan magister, dan kinerja lulusan program pendidikan keahlian teknik D3, D4, dan magister. Skala pengukuran yang digunakan adalah 1 sampai dengan 5, dengan menggunakan format Likert, yaitu format penulisan item yang paling sering digunakan untuk skala sikap dan kepribadian dimana dengan format penulisan seperti ini responden diminta untuk menunjukkan derajat kesetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan-pernyataan tertentu.
- b. Observasi sistematis dengan menggunakan pedoman pengamatan berupa daftar data yang perlu diamati. Instrumen ini digunakan untuk mengobservasi beberapa variabel prakondisi implementasi kebijakan yang berlangsung dilingkungan kerja peneliti. Hasil observasi ini akan memperkuat hasil analisis deskriptif dan induktif.
- c. Dokumentasi, yaitu pedoman yang memuat garisbesar atau kategori yang akan dicari datanya, dan *check-list* variabel yang akan dikumpulkan datanya. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data-data sebagai penunjang

analisis, seperti data kelulusan, IPK, program penyelenggaraan pendidikan dan pencapaiannya sampai saat penelitian ini.

- d. Wawancara juga dilakukan untuk memvalidasi data yang diperoleh melalui kuesioner.

5. Kalibrasi Konseptual Instrumen Pengungkap Data

Pengujian konseptual dilakukan untuk menguji validitas logis, konsep dan konstruk. Pengujian konseptual ini dilakukan melalui *Expert Judgement*, oleh ahli yang direkomendasikan pembimbing, yaitu:

- a. Prof. Dr. Nana Syaodih, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Secara ringkas *judgment* Prof. Dr. Nana Syaodih dapat disimpulkan berikut ini.
 - 1) Secara keseluruhan konsep penyusunan kisi-kisi dan pengembangan instrumen telah sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah, yaitu dilandasi oleh suatu teori yang relevan dengan substansi penelitian.
 - 2) Pengembangan instrumen telah cukup detail dan rinci, sehingga telah menjawab informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis.
 - 3) Jumlah pertanyaan terlalu banyak, sehingga dikhawatirkan jawaban responden akan bias. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya jumlah pertanyaan dikurangi.
 - 4) Format instrumens sebaiknya dirubah yang semula kotaknya vertikal menjadi kotak horizontal agar memudahkan responden dalam mengisi.
 - 5) Pilihan jawaban tidak harus selalu tepat di atas jawaban tetapi bisa juga diantaranya.

b. Prof. Dr. Nanang Fattah, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia.

Secara ringkas *judgment* dari Prof. Dr. Nanang Fattah dapat disimpulkan berikut ini.

- 1) Secara umum konsep dan konstruk telah sesuai dengan landasan teori yang akan digunakan. Namun, pemahaman terhadap teori "*public policy*" yang ditulis oleh William Dunn perlu dipertajam.
- 2) Jumlah pertanyaan terlalu banyak, perlu ada simplikasi untuk beberapa sub aspek yang akan diungkap informasinya.

c. Dr. Ir. Hermantor Dardak, Staf Ahli Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Judgment dari Dr. Hermanto Dardak dapat disimpulkan berikut ini.

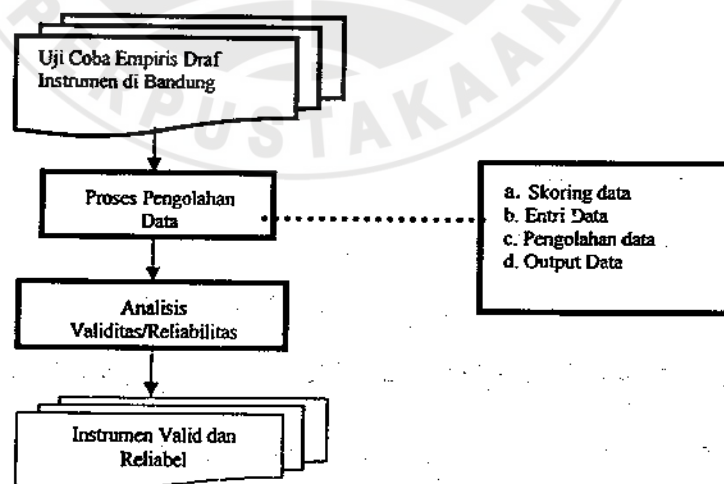
- 1) Konsep penyelenggaraan pendidikan sebaiknya diperluas dengan mempelajari pengalaman-pengalaman negara-negara di ASEAN, seperti Singapura dan Malaysia.
- 2) Konsep dan teori yang digunakan sudah relevan, tetapi untuk jumlah pertanyaan sebaiknya dikurangi, khususnya untuk kuesioner implementasi kebijakan.
- 3) Format D sebaiknya dipisahkan antara instrumen untuk mengungkap kinerja lulusan D3, D4, dan magister karena kompetensi dari masing-masing lulusan tersebut berbeda.
- 4) Apabila memungkinkan, dibuat instrumen terbuka untuk melihat dampak ekonomi para lulusan.

Beberapa kesamaan *judgment* para ahli yaitu tentang jumlah pertanyaan terlalu banyak, khususnya pada instrumen penelitian prakondisi implementasi kebijakan. Adapun instrumen kinerja lulusan, akan mengikuti *judgment* dari Dr. Hermanto Dardak. Mengacu pada pandangan para ahli tersebut dan dikaitkan dengan hasil

pengolahan dan analisis uji empiris maka instrumen penelitian untuk prakondisi implementasi kebijakan dan tingkat implementasi kebijakan jumlah pertanyaannya dikurangi. Pengurangan ini tidak menghilangkan aspek, dan subaspek yang akan diungkap, tetapi mengurangi pertanyaan pada subaspek-subaspek tertentu yang dianggap telah diwakili oleh pertanyaan lainnya. Adapun instrumen penelitian kinerja lulusan, untuk mengungkap kinerja lulusan akan dipisahkan antara instrumen untuk mengungkap lulusan D3, D4, dan magister.

6. Kalibrasi Instrumen melalui Uji Coba Empirik

Pengujian empirik adalah suatu proses menguji keterbacaan suatu instrumen. Pengujian ini dilakukan terhadap pelaksana kebijakan yang ada di Pusat, Balai Kerjasama Pendidikan Diploma dan Magister Jalan dan Jembatan di Bandung, dan Balai Kerjasama Pendidikan Magister Pengembangan Sumber Daya Air di Bandung. Uji coba empirik diberikan kepada 45 orang pejabat dan staf Pusdiktek dan Balai yang ada di Bandung. Responden yang mengembalikan sebanyak 38, selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis, untuk menguji validitas dan reliabilitas. Bagan alir proses validasi empirik tampak pada gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 3.2. Alur Pengujian Instrumen secara Empirik

Uji validitas setiap butir pernyataan dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara skor yang diperoleh setiap responden pada butir pernyataan yang bersangkutan dengan skor total yang diperoleh responden dari keseluruhan komponen kuesioner. Untuk menghitung koefisien korelasi ini digunakan teknik korelasi. Dalam penelitian ini, koefisien validitas suatu butir pernyataan dinyatakan signifikan jika nilai probabilitas (*p-value*) untuk koefisien validitas suatu butir item lebih kecil dari 0,05.

Hasil analisis uji empiris terhadap instrumen penelitian prakondisi implementasi kebijakan, tingkat implementasi kebijakan, dan kinerja lulusan berikut ini.

- a. Prakondisi Implementasi. Dari 90 pernyataan, ternyata 86 butir pernyataan di antaranya, memiliki koefisien validitas yang signifikan pada $\alpha = 0,05$. Adapun empat butir pernyataan lainnya yaitu nomor 52, 76, 86, dan 88 koefisien validitasnya tidak signifikan. Proses dan hasil uji validitas ini disajikan pada Lampiran 7. Sementara itu, koefisien reliabilitas perangkat instrumen untuk mengungkap data prakondisi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan adalah sebesar $r_{\alpha} = 0,9306$ signifikan pada $\alpha = 0,01$ (proses perhitungannya secara lengkap disajikan pada Lampiran 7). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa instrumen pengungkap data pra kondisi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri atas 86 butir pernyataan dipandang layak untuk digunakan dalam penelitian.
- b. Tingkat Implementasi Kebijakan. Setelah diujicobakan, dari 170 pernyataan ternyata 166 butir pernyataan di antaranya memiliki koefisien validitas yang signifikan pada $\alpha = 0,05$. Adapun empat butir pernyataan lainnya yaitu nomor

41, 116, 130, dan 133 koefisien validitasnya tidak signifikan. Proses dan hasil uji validitas ini disajikan pada Lampiran 2. Sementara itu, koefisien reliabilitas perangkat instrumen pengungkap data tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan adalah sebesar $r = 0,9622$ signifikan pada $\alpha = 0,01$ (proses perhitungannya secara lengkap disajikan pada Lampiran 7). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa instrumen pengungkap data tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri atas 166 butir pernyataan dipandang layak untuk digunakan dalam penelitian.

- c. Kinerja Lulusan. Setelah diujicobakan, dari 104 pernyataan tersebut ternyata 102 butir pernyataan di antaranya, memiliki koefisien validitas yang signifikan pada $\alpha = 0,05$. Adapun dua butir pernyataan lainnya yaitu nomor 2 dan 25 koefisien validitasnya tidak signifikan. Proses dan hasil uji validitas ini disajikan pada Lampiran 3. Sementara itu, koefisien reliabilitas perangkat instrumen pengungkap data tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan adalah sebesar $r = 0,9828$ signifikan pada $\alpha = 0,01$ (proses perhitungannya secara lengkap disajikan pada Lampiran 7). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa instrumen pengungkap data tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri atas 102 butir pernyataan dipandang layak untuk digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan uji konseptual dan uji empiris maka jumlah item instrumens yang digunakan untuk mengungkap data prakondisi implementasi kebijakan, tingkat implementasi kebijakan, dan kinerja lulusan, dapat diuraikan sebagaimana tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7. Perubahan Alat Pengumpul Data Berdasarkan Hasil Analisis Empirik dan *Expert Judgement*

Alat Pengumpul Data Uji Coba Variabel/Subvariabel		Jumlah Pernyataan Pada Waktu Uji Empiris	Pengurangan Item		Jumlah Pernyataan yang Digunakan
			Uji Empiris	Judgement Ahli	
Pra-Kondisi Implementasi Kebijakan	Komunikasi	15 (1-15)	0	3	12
	Sumber Daya (Total)	55	4	11	44
	a. Pengelola	9 (16-23)	0	3	6
	b. Tenaga Pengajar	13 (24-36)	0	7	6
	c. Peserta Didik	5 (37-41)	0	0	5
	d. Sumber Belajar	6 (42-47)	0	1	5
	e. Sarana/ Prasarana	10 (48-57)	1 (52)	0	9
	f. Sistem Informasi	6 (58-63)	0	0	6
g. Dana	7 (64-70)	0	0	7	
	Disposisi	4 (71-74)	0	0	4
	Struktur Birokrasi	16 (75-90)	3 (76, 86, 88)	4	9
Tingkat Implementasi Kebijakan (APD B)	Total	170	3	33	132
	A. Pelaksanaan Program Kerjasama Pendidikan	41 (1-41)	2 (8, 41)	9	30
	B. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan	12 (42-53)	0	3	9
	C. Pengembangan Kurikulum	47 (54-100)	0	11	36
	D. Pengembangan Teknologi Pembelajaran	8 (101-108)	0	0	8
	E. Sistem Seleksi	18 (109-126)	1 (116)	6	12
	F. Pengembangan Bimbingan dan Konseling	44 (127-170)	2 (130, 133)	7	37
Kinerja Lulusan (APD D)	Total	104	2	17	85
	A. Kinerja Lulusan D3	25 (1-25)	2 (2, 25)	3	20
	B. Kinerja Lulusan D4	37 (26-62)	0	8	29
	C. Kinerja Lulusan Magister	42 (62-104)	0	6	36

Sumber: Hasil Penelitian diolah

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepada unit analisis atau responden dilakukan secara berbeda, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing unit analisis. Berikut ini organisasi pengumpulan data untuk mengungkap hubungan variabel prakondisi pelaksanaan kebijakan dengan tingkat implementasi kebijakan.

1. Kelompok responden manajemen pusat dan balai-balai. Pengumpulan data kepada manajemen dan staf dilingkungan Pusdiktek langsung dilaksanakan oleh peneliti dengan mengunjungi ruangan kerjanya masing-masing. Adapun untuk pimpinan dan staf yang ada di balai akan diminta untuk mengisi kuesioner.

2. Kelompok responden PTN mitra. Pengumpulan data untuk PTN yang ada di Pulau Jawa yaitu di Bandung (ITB, Unwim, Polban), Semarang (Undip) dan Surabaya (ITS), dilakukan dengan bantuan staf Balai Kerjasama Pendidikan Diploma dan Magister PSDA Bandung, Jalan dan Jembatan Bandung, Pengembangan Wilayah Semarang, dan Balai Kerjasama Pendidikan Diploma dan Magister Prasarana Lingkungan Permukiman di Surabaya. Sedangkan untuk PTN dan PTS mitra diluar Jawa, seperti Politeknik Negeri Lhokseumawe, Palembang, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makassar, Kupang, Kendari, dan Jayapura, disampaikan melalui angket. Sebelum kuesioner dikirim, terlebih dulu ditetapkan *contact person* di masing-masing PTN dan PTS mitra sebagai pembantu pengumpul data.
3. Kelompok responden tenaga pengajar. Kelompok responden tenaga mengajar difokuskan pada tenaga pengajar praktisi Dep. Kimpraswil.

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi faktual tentang pencapaian program penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik, meliputi pencapaian program penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik, pencapaian program pengembangan dan pembinaan kurikulum, pencapaian program bimbingan konseling.

Unit analisis untuk mengungkap mutu lulusan dan kinerja lulusan menggunakan instrumen pengumpulan dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Studi dokumentasi untuk mengumpulkan data-data dan informasi tentang IPK lulusan, dan ketepatan menyelesaikan studinya. Adapun kuesioner akan diberikan kepada para lulusan, atasan lulusan, bawahan lulusan, dan koleganya. Pengorganisasian pengumpulan data sebagaimana tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8.
Pengorganisasian Pengumpulan Data

Unit analisis	Petugas	Lokasi	Responden
Pertama: Pelaksana Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Keahlian Teknik	Peneliti dibantu Staf Pusdiktek Staf PTN Mitra	Bandung, Semarang, Surabaya. Lhokseumawe, Padang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, Kupang, Kendari, dan Jayapura	Jajaran manajemen dan staf Pusdiktek, Karyasiswa, Kaprod/Kajur PTN mitra. Karyasiswa, Kaprod/Kajur PTN mitra.
Kedua: Lulusan, Atasan Lulusan, Sejawat, dan Bawahan Lulusan	Peneliti dibantu staf Pusdiktek, dan Staf PTN mitra	Bandung, Jakarta, Makassar, Padang, dan Banjarmasin.	Lulusan, atasan, bawahan, kolega lulusan.

F. Prosedur dan Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menempuh prosedur sebagai berikut.

Pertama, menentukan skor setiap responden sesuai dengan ketentuan seperti telah diungkapkan dalam uraian model instrumen pengungkap data. Skoring dilakukan secara berpasangan, sehingga setiap responden memiliki skor untuk setiap variabel.

Kedua, verifikasi data penelitian bertujuan memilahkan antara data yang memadai dengan yang tidak memadai untuk diolah. Verifikasi ini didasarkan atas kelengkapan jawaban dan kewajaran jawaban. Jawaban yang tidak lengkap -- dalam arti ada butir pernyataan yang tidak dijawab -- dan jawaban yang tidak wajar, misalnya jawabannya sama untuk semua butir pernyataan atau jawabannya mengikuti pola tertentu, tidak diikutsertakan dalam pengolahan data lebih lanjut. Dengan cara ini, dari 145 responden ada dua yang tidak memadai untuk diolah, sehingga data yang memadai untuk diolah adalah 143 responden. Skor yang diperoleh pada tahap ini tingkat pengukurannya ordinal. Selanjutnya data ordinal ini disajikan dalam tabel induk data sesuai pasangannya masing-masing.

Ketiga, membuat pedoman konversi data ordinal ke dalam data interval untuk setiap variabel penelitian dengan menggunakan *Method of Successive Interval*.

Keempat, mengubah data ordinal ke interval sesuai dengan pedoman pada langkah ketiga.

Kelima, melakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif berupa rata-rata hitung, median, modus, simpangan baku, dan variansi untuk analisis univariat. Sementara itu statistik inferensial digunakan untuk uji korelasi, regresi, dan analisis jalur. Keseluruhan proses perhitungannya dilakukan dengan menggunakan paket program *SPSS for Windows*. Proses dan hasil pengujian hipotesis penelitian ini beserta *print out* program *SPSS*, secara rinci disajikan pada Lampiran 2.

Selanjutnya, dalam menganalisis data penelitian ini ditempuh beberapa teknik analisis berikut ini.

1. Teknik analisis statistik deskriptif, data analisis statistik induktif berupa analisis univariat, bivariat dan multivariat, digunakan untuk menganalisis hubungan tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan sebagai variabel dependen dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai variabel independen.
2. Teknik analisis statistik deskriptif, analisis *causal-effect* digunakan untuk mengungkap hubungan antara tingkat implementasi kebijakan dengan keluaran dan *outcome*.

Adapun teknik analisis sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai berikut.

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif, dan Statistik Univariat, Bivariat dan Multivariat.

a. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik data penelitian dengan menggunakan tabel-tabel antara lain distribusi frekwensi, grafik, diagram, dan beberapa ukuran statistik seperti persentase, rata-rata simpangan baku yang diperlukan.

b. Analisis Univariat

Analisis ini bertujuan menganalisis satu variabel. Bentuk yang paling dasar untuk menggambarkan data univariat adalah dengan melaporkan setiap kasus secara individual. Tujuan utama dari analisis ini adalah mendeskripsikan tentang orang atau unit-unit analisis lainnya yang diteliti.

c. Analisis Bivariat

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis nomor satu beserta hipotesis 2, 3, 4, 5.

d. Analisis Multivariat

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis nomor satu beserta sub-sub hipotesis 5.

2. Analisis Statistik Deskriptif, *Causal-Effect*, dan *Incremental Analysis*

Data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumentasi, dilakukan analisis statistik deskriptif. Data dimaksud adalah data keluaran pendidikan profesional keahlian teknik, meliputi IPK dan ketepatan menyelesaikan studi untuk setiap jenjang D3, D4, dan magister. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikelompokkan secara interval menurut jenjang pendidikan, dan kelompok IPK. Teknik analisis *causal-effect* digunakan untuk menganalisis hubungan antara tingkat implementasi kebijakan dengan keluaran dan kinerja lulusan.

G. Asumsi

Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang dijadikan landasan pengkajian masalah dalam penelitian ini.

1. Usaha pendidikan dan pengajaran atau instruksional merupakan suatu sistem, dan proses belajar-mengajar merupakan operasionalisasinya (Banthy, 1968; Kaufman, 1972; Wong & Raulson, 1974; Gagne & Briggs, 1978, dalam Makmun A.S, 1986).
2. Administrasi merupakan suatu instrumen untuk mengoptimalkan berfungsinya komponen-komponen suatu sistem (termasuk sistem pendidikan) secara terencana, terorganisir, terarah, terkoordinasi, atau terkendali serta terevaluasi efektivitas dan efisiensinya (Kaufman, 1972; Briggs & Gagne, 1978; Karol & Ginsburg, 1980, dalam Makmun, A.S, 1986).
3. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar secara sistematis terjadi saling pengaruh (interaksi) di antara komponen-komponennya dan konsekuensinya akan memberikan corak pula terhadap hasil belajar baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (Campbell & Stanley, 1969; Popham & Sirotnik, 1973; Isaac & Michael, 1980; dan Sudjana, 1980, dalam Makmun, 1986).
4. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 Tahun 1989 pasal 1 butir 1, menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Secara sistemik dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah proses transaksional dari totalitas perangkat masukan (*raw, instrumental and environmental inputs*) untuk

menghasilkan keluaran (*observed outputs*) sesuai dengan yang diharapkan/minimum *acceptable performance, intended output* (Makmun, 1999).

5. Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang yang mematuhi keputusan tersebut (Jones, 1996:47; Supandi, 1988). Secara umum sebuah kebijakan menempuh sebuah proses yang dimulai dari perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan (Azis, 2004:2). Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, legislatif, dan yudikatif untuk memberikan koridor atau pedoman bertindak dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Hill, 1997:6; Anderson, 1989:5; LAN RI, 1999:4; Amir Santoso, 1993:4-5). Kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional (Good, 1959).
6. Variabel penting yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu struktur birokrasi atau karakteristik organisasi pelaksana kebijakan, sikap dan kompetensi dan ukuran staf, tingkat, sumber daya, komunikasi terbuka atau jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal (Van Horn dan Van Meter, 1975:116-7; Edward, 1981; Dunn, 1989; Brienkorho dan Crosby, 2002). Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi (*content*), yaitu kepentingan yang dipengaruhi, bentuk manfaat yang diberikan, luasnya perubahan-perubahan yang diinginkan, letak pembuatan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang tersedia serta konteks kebijakan, yaitu

strategi para aktor yang terlibat, karakteristik kelembagaan, sikap tanggap para pelaksana (Marilee, 1980; USAID, 1997). Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial, teknologi, dan konteks politik (Howlet, Ramesh, 1995:155-56). Implementasi kebijakan merupakan mata rantai antara perumusan dan penetapan kebijakan dengan evaluasi kebijakan (Edward, 1989:1). Implementasi adalah melaksanakan suatu keputusan-keputusan, yang biasanya ditetapkan dalam bentuk ketetapan tetapi dapat juga dalam bentuk perintah pimpinan (Mazmanian dan Sabatier, 1983:20-21).

7. Mutu adalah kesesuaian dengan tujuan, kepuasan pelanggan, atau sebagai totalitas karakteristik dari suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan yang ditetapkan secara eksplisit dan implisit (Juran, 1982; Sallies, 1993:22; Ishikawa, 1992; Webster, 1994:69). Dari sudut pandang para pembuat produk, "mutu dipandang sebagai derajat pencapaian spesifikasi rancangan yang telah ditetapkan, sedangkan dari sudut pandang pemakai, mutu diukur dari kinerja produk, suatu kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya, dan dari sudut pandang lain, yaitu kelompok pelanggan yang rasional, derajat mutu dilihat dari perbandingan kegunaan sebuah produk dengan harga yang harus dibayar oleh pemakai tersebut (Satori, 1999:4). Penguasaan kompetensi sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Kinerja diartikan sebagai unjuk kerja atau hasil kerja atau prestasi kerja atau sebagai keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau hasil fungsional dari suatu pelaksanaan pekerjaan secara spesifik dalam kurun waktu tertentu atau merupakan hasil dari keluaran (Spencer dan Spencer, 1993, Smith, 1982:393; Bernard & Russel, 1998:239).

H. Hipotesis Penelitian

Mengacu kepada permasalahan, tujuan, dan asumsi-asumsi penelitian, maka masalah penelitian ini dirumuskan ke dalam hipotesis berikut ini.

1. Antara komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, terdapat hubungan yang positif signifikan.
2. Komunikasi kebijakan berpengaruh positif signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.
3. Sumber daya berpengaruh positif signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.
4. Struktur birokrasi berpengaruh positif signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.
5. Disposisi pelaksana kebijakan berpengaruh positif signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.
6. Komunikasi kebijakan, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana kebijakan secara gabungan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.